



# **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
MENANDATANGANI PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KEPUTUSAN  
TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 136/KEP/2010**

**TANGGAL : 14 JUNI 2010**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 136/KEP/2010**

**TENTANG  
PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
MENANDATANGANI PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KEPUTUSAN  
TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :** bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di lingkungan Kedeputusan Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun, perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Persetujuan Teknis dan Surat Keputusan Tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2008;

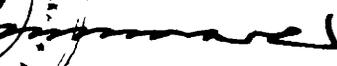
## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberi kuasa kepada pejabat Badan Kepegawaian Negara yang namanya tersebut pada lajur 2, pangkat, golongan ruang dan jabatan tersebut pada lajur 3 dan lajur 4, dengan spesimen tanda tangan dan paraf masing-masing tersebut pada lajur 6 dan lajur 7. Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, untuk atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara menandatangani persetujuan teknis dan surat keputusan tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada lajur 5 Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya diperkenankan menandatangani persetujuan teknis dan surat keputusan tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat dan golongan ruang paling tinggi sama dengan pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya.
- KETIGA : Pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU tidak berlaku lagi apabila pejabat yang bersangkutan berhenti/diberhentikan atau dimutasikan pada jabatan lain.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 195/KEP/2009 tanggal 24 September 2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara untuk Menandatangani Pertimbangan Teknis, Persetujuan Teknis, dan Surat Keputusan tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juni 2010

  
**KEPALA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**  
  
**EDY TOPO ASHARI**

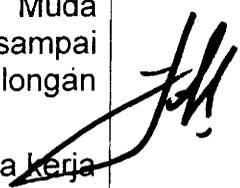
Tembusan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan dengan hormat kepada :

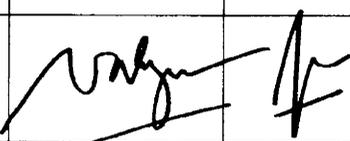
1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
8. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I yang bukan merupakan bagian dari Kementerian/LPNK;
9. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia;
10. Gubernur/Bupati/Walikota;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
13. Kepala PEKAS Tentara Nasional Indonesia/POLRI;
14. Direktur Utama PT. TASPEN (Persero);
15. Direktur Utama PT. ASABRI (Persero);
16. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Persero);
17. Kepala Kantor Cabang PT. ASABRI (Persero); dan
18. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

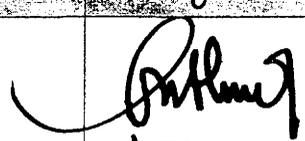
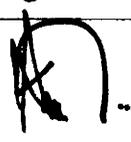
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 136/KEP/2010  
TANGGAL : 14 JUNI 2010

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN	JENIS PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KEPUTUSAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr. SULARDI, M.M. 19550706 198201 1 001	Pembina Utama IV/e	Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persetujuan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang Ib sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;</li> <li>• Persetujuan teknis peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>• Persetujuan teknis perbantuan Pegawai Negeri Sipil, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, rehabilitasi, pengesahan/pemutihan, dan perbaikan data kepegawaian;</li> <li>• Surat Keputusan Pemindahan PNS Pusat antar Kementerian/Lembaga dan PNS Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota menjadi PNS Pusat Kementerian/ Lembaga.</li> </ul>		

1	2	3	4	5	6	7
2.	Drs. AGUS ABDUL WATHON 19520817 198201 1 001	Pembina Utama Madya IV/d	Direktur Kepangkatan dan Mutasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;</li> <li>• Persetujuan teknis peninjauan masa kerja PNS;</li> <li>• Persetujuan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, rehabilitasi, pengesahan/pemutihan, dan perbaikan data kepegawaian;</li> <li>• Surat Keputusan Pemindahan PNS Pusat antar Kementerian /Lembaga dan PNS Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota menjadi PNS Pusat Kementerian / Lembaga.</li> </ul>		

1	2	3	4	5	6	7
3.	NANIEK KRISNAWATI, S.H., M.Si. 19540902 198503 2 001	Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Sub Direktorat Administrasi Kepangkatan dan Mutasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;</li> <li>• Persetujuan teknis peninjauan masa kerja PNS;</li> <li>• Persetujuan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, rehabilitasi, pengesahan/pemutihan dan perbaikan data kepegawaian;</li> <li>• Surat Keputusan Pemindahan PNS Pusat antar Kementerian/ Lembaga dan PNS Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota menjadi PNS Pusat Kementerian/ Lembaga.</li> </ul>		
4.	EMERENTIANA SAPTANINGSIH, S.H. 19590123 198411 2 001	Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Sub Direktorat Kepangkatan dan Mutasi II	sda		
5.	H. WINARTO, S.H. 19541130 198503 1 001	Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Sub Direktorat Kepangkatan dan Mutasi III	sda		

1	2	3	4	5	6	7
6.	Drs. DWI WAHYUDI 19610826 198111 1 001	Pembina IV/a	Kepala Sub Direktorat Kepangkatan dan Mutasi I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina golongan ruang IV/a;</li> <li>• Persetujuan teknis peninjauan masa kerja PNS;</li> <li>• Persetujuan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, dan perbaikan data kepegawaian.</li> </ul>		
7.	URIP WAHYUNI, S.H., M.Si. 19630612 199203 2 001	Pembina IV/a	Kepala Seksi Penyampaian Data	sda		
8.	BASIRAN 19560829 197810 1 001	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Penerimaan Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d;</li> <li>• Persetujuan teknis peninjauan masa kerja PNS;</li> <li>• Persetujuan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, dan perbaikan data kepegawaian.</li> </ul>		
9.	THAMRIN BARLIAN 19541203 197902 1 001	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Kepangkatan dan Mutasi II. A	sda		

1	2	3	4	5	6	7
10.	Drs. ARDIMAN NAIBAHO 19550806 197704 1 001	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Kepangkatan dan Mutasi I. A	sda		
11.	KARTIKO 19560606 197901 1 001	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Kepangkatan dan Mutasi II. B	sda		
12.	BUDIANTORO 19561105 197704 1 001	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Kepangkatan dan Mutasi III. A	sda		
13.	N JAMILAH, S.Sos 19620517 198403 2 001	Penata III/c	Kepala Seksi Kepangkatan dan Mutasi I B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata golongan ruang III/c;</li> <li>• Persetujuan teknis peninjauan masa kerja PNS;</li> <li>• Persetujuan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, dan perbaikan data kepegawaian.</li> </ul>		
14.	ACHMAD YUSAQ, SE 19640808 198603 1 001	Penata III/c	Kepala Seksi Perekaman dan pemeliharaan Data	sda		
15.	RATNA HERAWATI, S.Sos 19631204 198509 2 001	Penata III/c	Kepala Seksi Pelayanan Direktorat	sda		

1	2	3	4	5	6	7
16.	SUHARTO 19650125 198503 1 001	Penata Muda Tk.I III/b	Kepala Seksi Kepangkatan dan Mutasi III. B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;</li> <li>• Persetujuan teknis peninjauan masa kerja PNS;</li> <li>• Persetujuan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, dan perbaikan data kepegawaian.</li> </ul>		


 KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
  
 EDY TOPO ASHARI